KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : JK: tidak perlu kenaikan gaji
Tanggal : Jumat, 18 September 2015
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

JK: Tidak Perlu Kenaikan Gaji

Jakarta, Pelita

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam situasi ekonomi global yang sedang melemah, maka kenaikan gaji untuk pemimpin negara tidak perlu dilakukan.

"Dalam keadaan sekarang kita menjaga situasi. Tak perlu dinaikkan," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (17/9).

Selain itu, menurut JK, rencana kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanjara Negara atau APBN.

Namun JK menjelaskan kenaikan tunjangan untuk anggota DPR RI belum naik untuk saat ini. "Kita semua harus dalam konteks memahami bahwa ekonomi kita tak semudah lalu. Biar kita sama-sama hemat lah," kata JK.

Secara terpisah anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro membatalkan keputusan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara termasuk DPR karena dinilai belum mendesak.

"Ini (kenaikan tunjangan—**Red**) belum pas dan tidak ada urgensinya saat ini memberikan tambahan tunjangan pejabat," katanya di Gedung Parlemen ketimbang meminta kenaikan tunjangan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang menyatakan partainya menolak kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

"Saya pikir Demokrat tidak setuju itu (kenaikan tunjangan--**Red**). Rakyat lagi susah kayak begini, pengangguran tambah, inflasi tinggi, rakyat untuk makan saja susah," ujar Syarief Hasan seperti dikutip *Antara*.

Anggota Komisi I DPR ini menyatakan bahwa pendapatan sebagai anggota DPR sejauh ini sudah relatif cukup. Ia pun menegaskan DPR harus prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini.

Menurut dia, sebaiknya DPR mementingkan kondisi rakyat

"Lebih bagus itu rakyat dahulu diperhatikan. Belum lagi (ada bencana) asap, sudah susah dikasih asap lagi," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani mengatakan Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-520/MK.02/2015 menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dimasukkan dalam RAPBN 2016.

"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT Irma, Selasa (15/9).

Ia menyebutkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan tunjangan DPR RI yang besarnya mencapai Rp4 triliun itu relatif kecil atau hanya 0,00191 persen dari total belanja negara Rp2.039,5 triliun pada APBN 2015 sehingga tidak perlu diributkan. **(did)**